



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Januari 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA
UNIT KERJA : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MASMUNI MAHATMA**
2. Jabatan : **KEPALA KANWIL**
3. NHK : **900973**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.310.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 291 m2/100 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/44 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
3. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA BANGKA INDUK, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
4. Tanah Seluas 450 m2 di KAB / KOTA BANGKA INDUK, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
5. Tanah Seluas 1174 m2 di KAB / KOTA SUMENEP, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
6. Tanah Seluas 988 m2 di KAB / KOTA SUMENEP, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
7. Tanah Seluas 1374 m2 di KAB / KOTA SUMENEP, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **163.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOBIL, DAIHATSU MOBIL PENUMPANG Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **9.100.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	650.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.132.100.000
III. HUTANG	Rp.	451.481.400
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.680.618.600

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.